



Ada yang sudah 10 tahun izinnya sudah habis. Tantangan Bima seperti yang ia janjikan dulu, yakni, menertibkan angkot di Bogor.

Angkot Kota Bogor akan ditertibkan. Salah satunya tidak akan dikeluarkan izin untuk angkot "bodong." Pemerintah Kota Bogor tidak akan mengeluarkan izin terhadap 220 angkutan kota di Bogor yang izinnya sudah kadaluwarsa. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan semua angkot itu juga tidak akan diremajakan. Di antara mereka ada 10 tahun izinya sudah habis dan tidak diperpanjang.

Sebanyak 220 angkot itu berada di sejumlah trayek, antara lain, trayek Sukasari-Ciparigi, Ramayana-Ciheuleut, dan Terminal Baranangsiang-Bubulak.

Putusan ini diambil sekaligus untuk mengurangi jumlah angkot di Bogor yang dinilai sudah keterlaluhan. Pemerintah Bogor akan menawari pengusaha angkot yang tidak diperpanjang untuk bergabung dalam Trans Pakuan, perusahaan yang dikelola Pemkot Bogor. Bima menawarkan tiga angkot dikonversi menjadi satu bus trans Pakuan. Selama ini hampir semua angkot adalah milik perorangan.

Jika tidak mau bergabung, angkot itu hanya sebagai feeder atau moda penghubung karena yang berlalu lalang di dalam kota hanya bus Trans Pakuan.

Terhadap usul Bima, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat Bogor, Muhammad Ischak Abdul Rojak menolak. Menurut dia, tidak semudah itu Pemerintah menerapkan aturan semacam itu.

Ia menunjuk Bus Trans Pakuan selalu merugi. Jika dikonversi dari tiga angkot menjadi satu bus, itu, katanya, suatu kekonyolan karena juga akan merugi.

Angkot di kota Bogor memang dinilai sangat banyak. Demikian banyak sehingga Bogor mendapat julukan sinis, "Kota Sejuta Angkot." "Di mana-mana ada angkot, tapi jumlah penumpangnya minim. "Ngetem di mana-mana, dan bikin macet," kata Hery, warga Kedunghalang.

Ia meminta Wali Kota menertibkan angkot. "Jangan kalah gertak dengan pengusaha. Janji Bima adalah menertibkan angkot dan jalan-jalan di Bogor itu benar-benar kacau antara lain karena angkotnya banyak dan tidak tertib," katanya. (sas)